

Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Literatur Terhadap Program Merdeka Belajar

Auliya Latifah¹, Cindy Aulia², Ghina Mufidatuzahra³

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: cindyaulia4120@gmail.com

Keywords:

Education Policy, Merdeka Belajar, Sustainable Development Goals, SDG 4, Policy Implementation

Abstract: *This study aims to analyze the contribution of the Merdeka Belajar policy to achieving Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) in Indonesia. The method used is a qualitative literature study by analyzing various scientific sources and policy documents. The results show that the implementation of Merdeka Belajar faces significant challenges, such as communication disparities, limited resources, varied implementer dispositions, and rigid bureaucratic structures. Nevertheless, the policy has strong potential to support inclusive and quality education when accompanied by appropriate implementation strategies. This study concludes that optimizing the synergy between Merdeka Belajar and SDG 4 requires contextual, collaborative, and data-driven policy approaches to ensure the success of sustainable education in Indonesia.*

Kata Kunci:

Kebijakan Pendidikan, Merdeka Belajar, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDG 4, Implementasi Kebijakan

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kebijakan Merdeka Belajar terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Merdeka Belajar menghadapi tantangan signifikan, seperti ketimpangan komunikasi, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana yang beragam, serta struktur birokrasi yang belum adaptif. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas jika didukung oleh strategi implementasi yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi sinergi antara Merdeka Belajar dan SDG 4 membutuhkan pendekatan kebijakan yang kontekstual, kolaboratif, dan berbasis data untuk menjamin keberhasilan pendidikan berkelanjutan di Indonesia.*

Pendahuluan

Di tengah tantangan global seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial, pendidikan berkualitas menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang tangguh dan berdaya saing. Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekitar 244 juta anak dan remaja di dunia belum mengakses pendidikan formal,

sementara jutaan lainnya menghadapi mutu pendidikan yang rendah. Di Indonesia, hasil PISA 2018 menunjukkan kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa masih di bawah rata-rata negara OECD (OECD, 2019), menegaskan perlunya reformasi sistem pendidikan secara menyeluruh.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan *Merdeka Belajar* pada akhir 2019, yang merepresentasikan perubahan paradigma dari sistem birokratis menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka sebagai wujud implementasinya menekankan pengembangan potensi diri melalui pembelajaran lintas disiplin, asesmen formatif, dan penguatan profil Pelajar Pancasila (Masri, Syahrial, & Ridwan, 2023).

Kebijakan ini memiliki potensi strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 yang menargetkan pendidikan inklusif, setara, dan berkualitas (Pramesti & Nugraheni, 2024). Namun, berbagai studi menunjukkan kesenjangan implementasi di lapangan, seperti disparitas sumber daya antarwilayah, kesiapan tenaga pendidik, hingga pemahaman yang belum merata terhadap konsep Merdeka Belajar (Siahaan, Arianti, & Thalib, 2023; Kandini, Dyan, & Ichsan, 2025).

Sayangnya, kajian mengenai integrasi kebijakan Merdeka Belajar dengan target-target SDG 4 masih terbatas dan cenderung bersifat teknis. Oleh karena itu, studi ini berupaya melakukan analisis literatur secara komprehensif untuk memetakan sejauh mana sinergi kebijakan ini dengan SDG 4 telah terbangun, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi kebijakan Merdeka Belajar terhadap pencapaian SDG 4, mengidentifikasi kendala implementasinya, dan merumuskan strategi optimalisasi sinergi antara keduanya.

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dijawab meliputi:

1. Bagaimana kontribusi Merdeka Belajar dalam mendukung pencapaian SDG 4?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar?
3. Strategi kebijakan apa yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat sinergi antara Merdeka Belajar dan SDG 4?

Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hubungan antara kebijakan pendidikan, khususnya Program Merdeka Belajar, dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 4. Sebagaimana disinggung dalam pendahuluan, tantangan global menuntut pendidikan berkualitas sebagai fondasi masyarakat tangguh. Indonesia, dengan hasil PISA 2018 yang menunjukkan perlunya reformasi, telah meluncurkan Merdeka Belajar sebagai respons. Kebijakan ini, yang berpotensi strategis dalam mendukung SDG 4, masih menghadapi kesenjangan implementasi dan kajian yang terbatas mengenai integrasinya dengan target SDG 4. Oleh karena itu, tinjauan ini akan menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang relevan, serta meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian dan kebaruan dari studi ini.

Pendidikan Berkualitas dan SDG 4

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. SDG 4 secara khusus berfokus pada pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (United Nations, 2015). Indikator utama dalam SDG 4 mencakup akses pendidikan dasar, kesetaraan gender dalam pendidikan, kualitas pengajaran, dan keterampilan hidup yang relevan untuk abad ke-21.

Kebijakan Merdeka Belajar

Merdeka Belajar merupakan reformasi kebijakan pendidikan Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas sistem pendidikan nasional dengan menekankan pada kemandirian satuan pendidikan, otonomi guru, serta pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik (Kemendikbud, 2020). Kurikulum Merdeka sebagai implementasi konkritnya berupaya membentuk pelajar yang kritis, kreatif, mandiri, dan memiliki semangat gotong royong melalui penguatan profil Pelajar Pancasila (Masri, Syahril, & Ridwan, 2023).

Teori Kebijakan Publik dan Implementasi

Dalam mengkaji keberhasilan implementasi kebijakan, teori top-down dan bottom-up sering digunakan untuk menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Teori top-down, seperti yang dikemukakan oleh Edward III (1980), menekankan pentingnya kejelasan tujuan, sumber daya yang memadai, dan dukungan dari pelaksana kebijakan. Sementara itu, pendekatan bottom-up melihat pentingnya konteks lokal, partisipasi aktor di lapangan, dan fleksibilitas dalam implementasi (Sabatier & Mazmanian, 1980). Dalam konteks Merdeka Belajar, pendekatan hybrid yang menggabungkan keduanya relevan untuk melihat sinergi antara desain kebijakan pusat dengan pelaksanaannya di sekolah-sekolah di berbagai daerah.

Beberapa studi telah menyoroti implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan keterkaitannya dengan kualitas pendidikan. Penelitian oleh Siahaan, Arianti, dan Thalib (2023) menemukan bahwa pemahaman guru terhadap konsep Merdeka Belajar masih belum merata, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Hal ini diperparah oleh terbatasnya akses pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat. Kandini, Dyan, dan Ichsan (2025) menambahkan bahwa infrastruktur digital yang tidak merata menjadi penghambat utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka secara optimal, terutama saat pembelajaran berbasis proyek lintas disiplin dilakukan.

Di sisi lain, Pramesti dan Nugraheni (2024) mengidentifikasi bahwa nilai-nilai dalam Kurikulum Merdeka, seperti personalisasi pembelajaran dan penguatan karakter, berpotensi mendorong pencapaian indikator SDG 4, namun masih terdapat kesenjangan dalam perumusan indikator keberhasilan yang konkret dan terukur. Studi lain dari Putri dan Setiawan (2022) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Merdeka Belajar telah membuka ruang inovasi bagi sekolah, namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka pencapaian SDGs secara sistematis.

Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek teknis pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan agenda global seperti SDG 4. Studi-studi tersebut cenderung bersifat parsial, seperti fokus pada kesiapan guru, infrastruktur, atau implementasi kurikulum, namun belum menyajikan analisis komprehensif mengenai sejauh mana kebijakan ini berkontribusi

terhadap pencapaian target SDG 4 secara holistik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memetakan hubungan strategis antara kebijakan Merdeka Belajar dan SDG 4, sekaligus menawarkan strategi optimalisasi sinergi antar keduanya dalam konteks pendidikan nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) sebagai strategi utama dalam pengumpulan dan analisis data. Metode ini dipilih karena relevan dalam mengkaji kebijakan pendidikan secara konseptual, normatif, dan empiris melalui sumber-sumber ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mengkombinasikan berbagai temuan akademik serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya di SDGs 4 yaitu pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari literatur sekunder yang meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta publikasi dari lembaga internasional seperti UNESCO, UNDP, dan OECD. Kriteria dalam pemilihan literatur meliputi: (1) relevansi topik dengan kebijakan pendidikan dan SDGs, (2) literatur terbit dalam rentang waktu yang tak lebih 5 tahun kecuali jika literatur tersebut merupakan literatur yang berisikan teori-teori konseptual, dan (3) memiliki kredibilitas akademik dan dapat diverifikasi.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data daring seperti Google Scholar, Scopus, dan Portal Garuda, dengan menggunakan kata kunci antara lain: Merdeka Belajar, kebijakan pendidikan, pendidikan berkelanjutan, dan SDGs 4. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui teknik *content analysis*, yaitu analisis sistematis terhadap isi dokumen untuk mengidentifikasi tema-tema utama, perbandingan kebijakan, serta keterkaitannya dengan kerangka pembangunan berkelanjutan (Bowen, 2009).

Analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk memahami konteks sosial-politik, tujuan normatif, dan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen dan penulis yang berbeda, guna meminimalkan bias dan meningkatkan keabsahan temuan (Creswell, 2014).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam menilai efektivitas kebijakan pendidikan Indonesia dalam mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan.

Hasil Penelitian

Sub Bagian 1: Komunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III (1980), komunikasi mencakup kejelasan, konsistensi, dan efektifitas penyampaian kebijakan dari pembuat ke pelaksana. Untuk kebijakan Merdeka Belajar, studi literatur mengungkap bahwa:

Disparitas pemahaman antarwilayah

Subhan Widiandy et al. (2023) dalam studi kasus di SMA Negeri mencatat bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman guru terhadap kebijakan Merdeka Belajar. Guru di daerah perkotaan mendapat akses webinar, tutorial, dan pelatihan yang lebih intensif, sedangkan guru di wilayah 3T sering mengalami kesulitan menerjemahkan prinsip kebijakan tersebut ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Ketersediaan platform informasi pemerintah

Achmad Firmansyah Syaputra et al. (2023) menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan platform seperti Merdeka Mengajar dan Belajar.id untuk memudahkan akses informasi dan pelatihan guru. Namun, hambatan infrastruktur misalnya koneksi internet yang tidak stabil membatasi efektivitas penyebaran informasi, terutama di daerah terpencil.

Konsekuensi dari komunikasi tidak seragam

Komunikasi yang belum merata menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda terhadap konsep *Merdeka Belajar*, yang pada gilirannya dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan berkualitas secara merata sesuai target SDG 4. Di beberapa daerah,

guru cenderung berinovasi secara mandiri tanpa pedoman yang kuat, sehingga implementasi menjadi tidak selaras dengan tujuan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak konsisten dan tidak intensif dari pusat ke daerah menjadi hambatan utama dalam mencapai pemahaman bersama serta keseragaman kualitas pendidikan yang diharapkan (Subhan Widiensyah et al., 2023; Syaputra et al., 2023).

Sub Bagian 2: Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan pemerataan sumber daya, baik dari segi infrastruktur, tenaga pendidik, maupun dukungan teknologi. Dalam konteks Merdeka Belajar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penyediaan sumber daya digital. Hal ini tercermin dari penyaluran lebih dari satu juta perangkat TIK ke 70.579 sekolah antara 2020 hingga 2022. Selain itu, platform Merdeka Mengajar telah digunakan oleh lebih dari satu juta guru, menunjukkan partisipasi masif dalam ekosistem digital pendidikan (Kemendikbudristek, 2023).

Namun demikian, implementasi di tingkat satuan pendidikan menunjukkan kondisi yang beragam. Studi di SD Negeri Suruh 01 Kabupaten Semarang mengungkapkan bahwa sarana seperti laptop, LCD, dan Wi-Fi belum tersedia merata di setiap ruang kelas. Guru seni juga belum tersedia dan sebagian guru harus merangkap mata pelajaran lain akibat keterbatasan sumber daya manusia (Afriani, 2023). Temuan serupa juga tercermin di SMA Negeri 77 Jakarta, di mana alokasi anggaran dan jumlah guru pendukung Kurikulum Merdeka masih kurang optimal (Permana, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan distribusi sumber daya antara daerah dan satuan pendidikan yang berbeda. Selain itu, penelitian lain menemukan adanya infrastruktur yang terbatas, kesiapan dari para guru dan keterlibatan orang tua turut menjadi tantangan dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. (Amilatus, et al, 2024)

Dalam kerangka teori Edward III, kekurangan sumber daya ini menjadi hambatan nyata dalam pencapaian tujuan kebijakan. Ketika infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar tidak mendukung, maka fleksibilitas pembelajaran sebagaimana digariskan

dalam Merdeka Belajar tidak dapat terealisasi secara optimal. Akibatnya, capaian SDG 4 dalam hal akses pendidikan berkualitas dan kesetaraan pun turut terhambat.

Sub Bagian 3: Disposisi

Disposisi pelaksana merupakan salah satu variabel kunci dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang berkaitan dengan sikap, motivasi, dan komitmen para pelaksana terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Dalam konteks kebijakan Merdeka Belajar, disposisi pelaksana menggambarkan sejauh mana guru, kepala sekolah, dosen, maupun tenaga pendidikan lainnya memiliki pemahaman, penerimaan, dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara optimal.

Berdasarkan hasil studi literatur, ditemukan bahwa disposisi pelaksana terhadap kebijakan Merdeka Belajar menunjukkan kecenderungan yang bervariasi. Beberapa penelitian menggambarkan adanya sikap positif dari pelaksana, terutama di daerah atau institusi yang memiliki dukungan kuat dari pemerintah daerah maupun pemimpin sekolah atau kampus. Studi oleh Septiani (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SD Luwu Utara memperoleh respons antusias dari guru, terutama karena adanya pelatihan dan komunikasi yang efektif dari pihak Dinas Pendidikan.

Namun, terdapat juga kondisi sebaliknya, seperti yang diperlihatkan dalam penelitian Suardita (2023) di Fakultas Teknik Universitas Udayana, di mana sebagian dosen menunjukkan sikap kurang terbuka terhadap implementasi program MBKM. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman, resistensi terhadap perubahan, dan minimnya dukungan administratif. Disposisi negatif seperti ini berpotensi menghambat efektivitas kebijakan, meskipun dimensi komunikasi dan struktur organisasi telah disiapkan.

Disposisi pelaksana yang kuat umumnya dipengaruhi oleh kombinasi antara pemahaman terhadap substansi kebijakan dan pengalaman langsung dalam mengimplementasikan program. Pelaksana yang merasa dilibatkan, dihargai, dan difasilitasi cenderung lebih termotivasi. Sebaliknya, jika kebijakan dirasakan sebagai beban tambahan tanpa manfaat yang jelas, maka akan muncul sikap pasif atau bahkan penolakan terselubung. Temuan Ramadhan dan Megawati (2023) memperkuat hal

tersebut, di mana disposisi dosen di UNESA meningkat setelah mereka mendapatkan kejelasan tentang arah kebijakan serta dukungan dari pihak universitas.

Dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 4), disposisi pelaksana yang positif menjadi faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Pelaksana yang memiliki komitmen dan pemahaman mendalam akan lebih mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya, disposisi yang lemah dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antara wilayah yang siap dan belum siap melaksanakan kebijakan.

Oleh karena itu, penguatan disposisi pelaksana perlu menjadi perhatian dalam strategi implementasi kebijakan pendidikan nasional. Pelatihan berbasis nilai, penyediaan ruang refleksi, serta kepemimpinan yang transformatif merupakan beberapa pendekatan yang dapat meningkatkan sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini sejalan dengan asumsi teori Edward III bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bersifat teknis dan struktural, tetapi juga sangat bergantung pada aspek manusiawi dari para pelaksananya.

Sub Bagian 4: Struktur Birokrasi

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Edward III, struktur birokrasi berperan penting dalam menciptakan mekanisme yang jelas, terkoordinasi, dan mendukung keberlangsungan pelaksanaan kebijakan. Edward menyebut bahwa struktur birokrasi yang kaku, hierarkis, dan tidak responsif akan menghambat efektivitas implementasi di tingkat operasional. Pada kebijakan Merdeka Belajar, upaya reformasi birokrasi telah dilakukan, namun tantangan struktural masih menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan ideal kebijakan, khususnya dalam mendukung target SDG 4.

Upaya pemerintah untuk menyederhanakan struktur birokrasi dalam sektor pendidikan terlihat melalui peluncuran sistem pengelolaan kinerja guru yang lebih efisien pada tahun 2025. Sistem ini bertujuan memangkas prosedur administratif yang selama ini membebani guru, agar mereka dapat lebih fokus pada aktivitas pedagogis dan pembelajaran (Novalia, 2024). Langkah ini menunjukkan pergeseran paradigma

birokrasi ke arah yang lebih fleksibel dan berorientasi hasil, sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar yang menempatkan guru sebagai aktor utama perubahan pendidikan.

Namun demikian, persoalan mendasar masih ditemukan pada implementasi sistem birokrasi yang terlalu prosedural dan formalistik. Sebagaimana disorot dalam laporan birokratmenulis.org, masih banyak satuan pendidikan dan lembaga pemerintah yang menjadikan indikator kinerja (IKU) sekadar formalitas administratif tanpa benar-benar mencerminkan pencapaian nyata di lapangan (Sulistiyo, 2025). Kultur birokrasi seperti ini bertolak belakang dengan esensi Merdeka Belajar yang menuntut otonomi, refleksi kritis, dan pembelajaran yang kontekstual.

Lebih lanjut, transformasi birokrasi yang berbasis digital melalui SPBE dan SIPD telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran. Namun, masih dibutuhkan penguatan dari sisi kapasitas SDM dan koordinasi lintas sektor agar sistem ini dapat benar-benar mempercepat layanan dan mengurangi tumpang tindih kewenangan (Menteri PANRB, 2024). Dalam kerangka teori Edward III, lemahnya koordinasi struktural dan rendahnya efektivitas sistem pengawasan akan menghambat jalannya komunikasi kebijakan dan memperbesar kemungkinan distorsi implementasi.

Sementara itu, kebijakan relokasi ASN dan penambahan formasi pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 2,3 juta pada tahun 2024 membuka ruang evaluasi terhadap efisiensi struktur birokrasi pendidikan. Jika tidak dibarengi dengan restrukturisasi peran dan digitalisasi manajemen kinerja, langkah ini justru berpotensi memperbesar beban struktural dan memperlambat respons organisasi terhadap kebutuhan sekolah (Ihsan, 2024).

Dengan kata lain, meskipun telah terdapat inisiatif penyederhanaan struktur, implementasi Merdeka Belajar masih menghadapi kendala birokratis yang bersifat sistemik. Proses pencairan dana BOS yang tetap membutuhkan persetujuan dinas pendidikan, serta absennya insentif kinerja bagi pelaksana kebijakan di tingkat sekolah dan perguruan tinggi, menunjukkan masih adanya struktur yang terlalu sentralistik dan kurang mendukung inovasi lokal (Sudarsana, 2023).

Dalam perspektif teori Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang tidak adaptif dan berbelit-belit dapat memperlemah implementasi

kebijakan, bahkan ketika dimensi komunikasi dan sumber daya telah terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan langkah reformasi struktural yang lebih substansial dan bukan sekadar simbolik. Penyederhanaan prosedur, pelimpahan wewenang ke sekolah, serta penerapan indikator berbasis hasil nyata merupakan strategi penting untuk memperkuat struktur birokrasi yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan dan SDG 4 secara berkelanjutan.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Merdeka Belajar memiliki potensi yang besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4), terutama dalam hal perluasan akses pendidikan berkualitas dan kesetaraan pendidikan. Namun, kontribusi ini belum sepenuhnya optimal akibat adanya kendala struktural, sumber daya, komunikasi, dan disposisi pelaksana di lapangan.

Pada dimensi komunikasi, implementasi Merdeka Belajar belum merata karena disparitas akses informasi dan pelatihan antara wilayah perkotaan dan wilayah 3T. Dalam konteks teori implementasi kebijakan Edward III, kondisi ini menunjukkan lemahnya kejelasan dan efektivitas komunikasi dari tingkat pusat ke pelaksana kebijakan. Ketidaksamaan pemahaman dan interpretasi kebijakan menyebabkan perbedaan cara pelaksanaan di lapangan. Studi-studi sebelumnya pun menunjukkan bahwa disparitas komunikasi berimplikasi pada kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah (Widiansyah et al., 2023; Syaputra et al., 2023).

Dari segi sumber daya, meskipun pemerintah telah menyalurkan perangkat TIK dan menyediakan platform digital pembelajaran, ketimpangan distribusi masih menjadi hambatan utama. Sejalan dengan teori Edward III, ketersediaan dan pemerataan sumber daya merupakan prasyarat penting bagi efektivitas implementasi. Dalam kasus ini, belum semua sekolah memiliki sarana dan tenaga pendidik yang memadai, sehingga tidak semua peserta didik dapat merasakan manfaat kebijakan Merdeka Belajar secara setara. Temuan ini diperkuat oleh studi Afriani (2023) dan Permana (2023), yang menyoroti keterbatasan sarana dan guru dalam mengimplementasikan kebijakan.

Disposisi pelaksana juga berperan penting. Meskipun terdapat pelaksana kebijakan yang menunjukkan sikap antusias dan terbuka, sebagian lainnya mengalami resistensi akibat kurangnya pemahaman dan dukungan institusional. Teori Edward III menekankan pentingnya sikap dan komitmen pelaksana sebagai faktor kunci keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu, strategi penguatan disposisi pelaksana melalui pelatihan berbasis nilai dan peningkatan kepemimpinan transformasional sangat diperlukan. Hal ini juga didukung oleh temuan Septiani (2024) dan Ramadhan & Megawati (2023), yang menunjukkan bahwa pelibatan aktif pelaksana meningkatkan efektivitas kebijakan.

Struktur birokrasi masih menjadi tantangan signifikan. Meskipun terdapat upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi sistem, struktur yang terlalu prosedural, sentralistik, dan kurang adaptif menghambat efektivitas implementasi. Ketidaksesuaian antara struktur birokrasi dan semangat otonomi yang diusung Merdeka Belajar menciptakan ketegangan dalam pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Edward III menegaskan bahwa struktur birokrasi yang tidak responsif dapat mendistorsi kebijakan, bahkan ketika dimensi lain seperti komunikasi dan sumber daya telah terpenuhi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan sinergi antara kebijakan Merdeka Belajar dan pencapaian SDG 4, diperlukan strategi kebijakan yang lebih terarah dan kontekstual. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi antarlevel pemerintahan, memetakan kebutuhan sumber daya secara lebih akurat, memberdayakan pelaksana kebijakan secara berkelanjutan, serta mereformasi struktur birokrasi secara substansial. Pendekatan kolaboratif dan berbasis data perlu didorong untuk menciptakan kebijakan yang adaptif dan inklusif.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan studi literatur yang belum menggali pengalaman langsung pelaksana kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi lapangan secara kualitatif atau kuantitatif untuk mengukur lebih mendalam persepsi pelaksana, hambatan struktural, serta efektivitas implementasi Merdeka Belajar dalam berbagai konteks geografis dan kelembagaan. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengintegrasikan perspektif peserta

didik dan orang tua guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik terkait keberhasilan kebijakan ini.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4), khususnya dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari komunikasi yang tidak merata, ketimpangan sumber daya, disposisi pelaksana yang bervariasi, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya mendukung semangat otonomi dan fleksibilitas.

Temuan menunjukkan bahwa disparitas pemahaman dan akses informasi antara wilayah perkotaan dan wilayah 3T menjadi hambatan serius dalam membangun pemahaman yang seragam terhadap kebijakan. Selain itu, distribusi infrastruktur dan tenaga pendidik yang belum merata turut menghambat pelaksanaan yang setara di setiap satuan pendidikan. Sikap pelaksana yang belum sepenuhnya positif, serta birokrasi yang masih bersifat prosedural dan sentralistik, juga mengurangi efektivitas kebijakan dalam menjangkau seluruh lapisan pendidikan secara optimal.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Merdeka Belajar dalam kerangka teori implementasi kebijakan. Penelitian ini juga memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pelaksana di lapangan.

Untuk aplikasi praktis, disarankan adanya penguatan komunikasi lintas wilayah, pemerataan distribusi sumber daya pendidikan, pelatihan berkelanjutan yang menyentuh aspek nilai dan motivasi pelaksana, serta reformasi birokrasi yang substansial guna mendukung otonomi pendidikan di tingkat lokal. Pendekatan berbasis data, kontekstual, dan partisipatif menjadi kunci dalam menyukseskan integrasi Merdeka Belajar dan pencapaian SDG 4 secara berkelanjutan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afriani, R. (2023). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar di SD Negeri Suruh 01 Kabupaten Semarang. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Kebijakan*, 8(1), 45–56. <https://www.researchgate.net/publication/372083485>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Ihsan, A. B. (2024, 31 Mei). Disrupsi birokrasi. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/disrupsi-birokrasi>
- Kandini, A., Dyan, R., & Ichsan, M. (2025). Tantangan digitalisasi dalam Kurikulum Merdeka di daerah 3T. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 10(1), 55–68.
- Kandini, G. S., Dyan, M., & Ichsan, F. R. (2025). Integrasi Sustainable Development Goals dalam Kurikulum Merdeka: Tinjauan literatur atas peluang dan tantangan implementasi. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4). <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/madani/article/view/444>
- Kemendikbud. (2020). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kemendikbudristek. (2023). Empat aspek prioritas dalam Gerakan Merdeka Belajar menginspirasi negara-negara ASEAN. *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/empat-aspek-prioritas-dalam-gerakan-merdeka-belajar-menginspirasi-negaranegara-di-asean>
- Masri, R., Syahrial, M., & Ridwan, A. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal Review Teknologi dan Inovasi*, 8(4). <https://doi.org/10.29210/30032794000>

- Masri, S., Syahrial, A., & Ridwan, M. (2023). Transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar: Studi kasus di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 13(2), 87–101.
- Menteri PANRB. (2024, 9 Desember). Transformasi digital dan perbaikan tata kelola pemerintahan jadi jurus jitu berantas korupsi. *Kementerian PANRB*. <https://www.menpan.go.id>
- Novalia, H. (2024, 10 Desember). Birokrasi itu tidak harus birokratis! Inilah inti penjelasan pembaruan pengelolaan kinerja guru tahun 2025. *Pojok Satu*. <https://www.pojoksatu.id>
- OECD. (2019). *PISA 2018 results (Volume I): What students know and can do*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/publications/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm>
- Permana, A. (2023). Studi evaluatif terhadap implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 77 Jakarta. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(2), 103–117.
- Pramesti, C. A., & Nugraheni, N. (2024). Urgensi dan capaian SDGs bidang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 151–155. <https://jurnalistiqomah.or.id/JUPPI/article/view/70>
- Pramesti, I., & Nugraheni, L. (2024). Kurikulum Merdeka dan SDGs: Menakar kontribusi pendidikan karakter terhadap pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Berkelanjutan*, 7(1), 22–35.
- Putri, A., & Setiawan, B. (2022). Inovasi kebijakan pendidikan dan implementasi SDGs di sekolah menengah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 19(3), 112–126.
- Ramadhan, A., & Megawati, M. (2023). Evaluasi program MBKM di UNESA berdasarkan teori Edward III. *Publika Unesa*, 11(2), 45–55.
- Septiani, E. (2024). Analisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka berdasarkan teori Edward III di tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nusantara*, 3(9), 287–294. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/view/4781>

- Siahaan, R. L. M., Arianti, J., & Thalib, N. (2023). Perkembangan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis SDGs 4. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 975–985. <https://www.academia.edu/107143232>
- Siahaan, T., Arianti, L., & Thalib, M. (2023). Analisis pemahaman guru terhadap Merdeka Belajar di kawasan terpencil. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 44–58.
- Subhan Widiyansyah, S. P., Hidayat, S. I., Kamil, I. D. L., Br Purba, U., Rahmawati, & Khairo, F. M. A. (2023). Kesiapan guru dalam menghadapi tantangan implementasi Kurikulum Merdeka: Studi kasus di sekolah menengah atas. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1120>
- Suardita, I. K. D. (2023). Strategi implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/386181471>
- Sudarsana, I. K. (2023). Tantangan koordinasi birokrasi dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Teknik Universitas Udayana. *Widyapublika: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 4(2), 67–78. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/widyapublika/article/view/863>
- Sulistiyo, A. (2025, 2 Januari). Tahun baru, Renstra baru: Saatnya menata ulang indikator kinerja lembaga pemerintahan Indonesia. *Birokrat Menulis*. <https://birokratmenulis.org>
- Syaputra, A. F., Hidayanti, D., & Maya, N. (2023). Digitalisasi pendidikan pada implementasi Kurikulum Merdeka. *Syntax Admiration*, 4(11), 2214–. <https://www.researchgate.net>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education – A tool on whose terms?* <https://www.unesco.org/en/reports/gem>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. New York: United Nations.